



Strategi Diplomasi Perdagangan Dan Investasi Menuju Indonesia Emas 2045

Maimunah, Muliahadi Tumagor, Suwito

Ekonomi Pertahanan/ Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Alamat : Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810

Korespondensi email : maimunah.sambas@gmail.com

ABSTRAK

Due to the tendency to depend on certain economic sectors in an effort to support Indonesia Emas 2045 through trade and investment diplomacy. In addition, there is the phenomenon of global economic uncertainty, such as trade wars, geopolitical instability, and currency fluctuations. This research aims to find out how trade and investment diplomacy strategies achieve the goal of the Golden Indonesia 2045. The research method used is the Literature Method, the results of the study concluded that the strategy of trade and investment diplomacy towards golden Indonesia 2045 is by strengthening bilateral and multilateral relations, opening new market access, providing trade and investment facilitation, conducting investment promotions and trade fairs, increasing infrastructure development, risk management and legal stability, strengthening leading sectors, education and human resource development, innovation and technology development, empowering SMEs, empowering local communities and sustainability and the environment.

Keywords: Trade Diplomacy, Foreign Investment, Infrastructure Development, Golden Indonesia 2045

Abstrak

Karena adanya kecenderungan ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi tertentu dalam upaya mendukung Indonesia Emas 2045 melalui diplomasi perdagangan dan investasi. Selain itu adanya fenomena ketidakpastian ekonomi global, seperti perang perdagangan, ketidakstabilan geopolitik, dan fluktuasi mata uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana strategi diplomasi perdagangan dan investasi mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Metode yang penelitian yang digunakan adalah Metode Literatur, hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi diplomasi perdagangan dan investasi menuju indonesia emas 2045 yaitu dengan melakukan Penguatan Hubungan Bilateral dan Multilateral, Pembukaan Akses Pasar Baru, menyediakan Fasilitasi Perdagangan dan Investasi, melakukan Promosi Investasi dan Pameran Dagang, meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Pengelolaan Risiko dan Kestabilan Hukum, Penguatan Sektor Unggulan, Pendidikan dan Pengembangan SDM, Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Pemberdayaan UKM, Pemberdayaan Masyarakat Lokal serta Keberlanjutan dan Lingkungan.

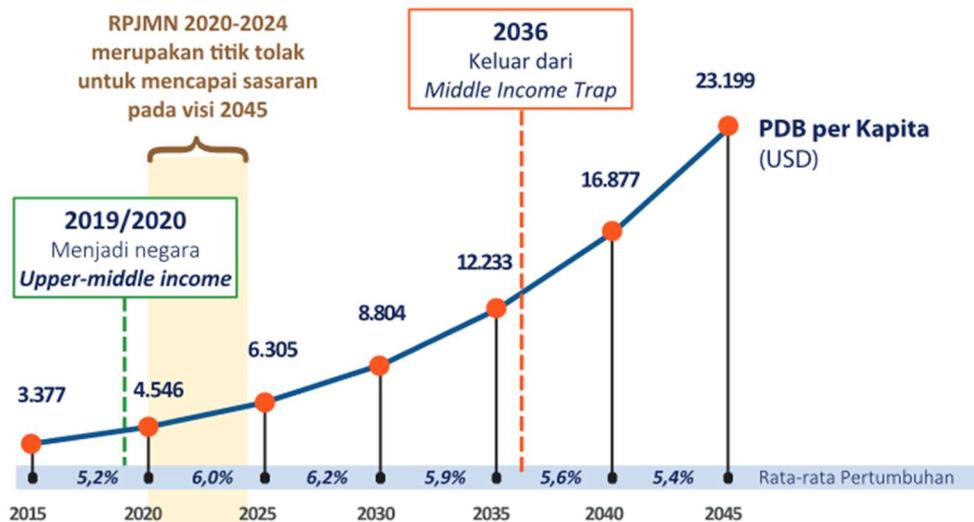
Kata Kunci: Diplomasi Perdagangan, Investasi Asing, Pengembangan Infratraktur, Indonesia Emas 2045.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang semakin berkembang, diplomasi perdagangan dan investasi menjadi salah satu instrumen utama bagi suatu negara dalam meningkatkan daya saing ekonominya. Indonesia, sebagai negara dengan potensi ekonomi yang besar, telah mengidentifikasi pentingnya mengadopsi strategi diplomasi perdagangan dan investasi yang efektif untuk mencapai visi "Indonesia Emas 2045". Visi ini menetapkan target untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan ekonomi terbesar ke-5 di dunia pada tahun 2045. Dimana Indonesia memiliki kekayaan alam dan sumber daya manusia yang melimpah, namun untuk mencapai ambisi Indonesia Emas 2045, perlu diterapkan strategi

diplomasi perdagangan dan investasi yang kuat. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan persaingan yang semakin ketat, penting bagi Indonesia untuk membangun hubungan yang kuat dengan mitra dagang dan menarik investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dapat kita lihat dari gambar dibawah tentang target pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 sampai 2045:

Target Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju



TRANSFORMASI EKONOMI dimulai pada tahun **2020-2024** untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju

RATA-RATA PERTUMBUHAN 2015-2045:		TAHUN 2045:	
PDB RIIL	PDB RIIL PER KAPITA	NEGARA MAJU DAN PDB TERBESAR	PERANAN KTI MENJADI
5,7%	5,0%	ke-5 (USD 7,4 triliun)	25%

Dari dua gambar diatas dapat kita melihat bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2015-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan

menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan strategi diplomasi perdagangan dan investasi menuju Indonesia Emas 2045 antara lain adalah:

1. **Persaingan Global:** Persaingan global yang intensif memerlukan identifikasi pasar potensial dan formulasi strategi yang efektif untuk memasuki pasar-pasar tersebut.
2. **Regulasi dan Kebijakan:** Perlu adanya penyelarasan dan penyederhanaan regulasi serta kebijakan investasi untuk meningkatkan daya tarik bagi investor asing.
3. **Infrastruktur:** Infrastruktur yang belum memadai dapat menjadi hambatan dalam mendukung pertumbuhan perdagangan dan investasi.
4. **Peningkatan Daya Saing:** Upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri nasional sehingga dapat bersaing secara global.

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Diplomasi Perdagangan

Menurut Bhagwati dan Patrick (1990) dalam buku "Aggressive Unilateralism: America's 301 Trade Policy and the World Trading System," diplomasi perdagangan dapat diartikan sebagai upaya suatu negara untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan ekonomi nasionalnya melalui penggunaan alat-alat diplomasi, seperti negosiasi perdagangan dan implementasi kebijakan ekonomi. Sedangkan menurut Almonacid (2012) dalam artikelnya yang berjudul "Diplomacy in the Global Trade System," diplomasi perdagangan juga mencakup perundingan dan perjanjian dagang antara negara-negara, serta interaksi dengan organisasi internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Jadi dapat disimpulkan bahwa Diplomasi perdagangan adalah upaya suatu negara untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan ekonomi nasionalnya melalui interaksi diplomatik dengan negara-negara lain, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan ekonomi global. Diplomasi perdagangan melibatkan sejumlah aktivitas, termasuk negosiasi perjanjian dagang, perundingan ekonomi, advokasi kebijakan perdagangan, dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan ekonomi nasional.

1.2. Diplomasi Investasi

Pendapat Karl P. Sauvant: menggambarkan diplomasi investasi sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, membangun kepercayaan investor, dan mengelola hubungan investasi internasional. Jonathan Bonnitche, Lauge N. Skovgaard Poulsen, & Michael Waibel: Para penulis ini membahas diplomasi investasi dalam konteks perlindungan hukum terhadap investasi asing dan peran negosiasi dalam pembentukan perjanjian investasi, sedangkan UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development):UNCTAD memandang diplomasi investasi sebagai serangkaian aktivitas diplomatik yang melibatkan negosiasi, perundingan, dan pembentukan perjanjian investasi untuk melindungi hak-hak investor dan memfasilitasi aliran investasi. jadi Diplomasi investasi merupakan instrumen strategis yang digunakan pemerintah untuk memajukan kepentingan ekonomi nasional, menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, dan memfasilitasi aliran investasi internasional. Fokusnya melibatkan negosiasi, pembentukan perjanjian, dan perlindungan hukum terhadap investasi asing, dengan tujuan menciptakan kestabilan, keamanan, dan keberlanjutan dalam hubungan investasi global.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data yang bersifat literatur. Teknik analisis data dalam mengumpulkan data yang digunakan adalah metode pengumpulan data dokumenter atau studi literatur Strategi Diplomasi dan Investasi Menuju Indonesia Emas 2045. Dengan demikian penelitian ini akan menginterpretasi data dengan tujuan untuk memberi gambaran yang akurat mengenai fakta-fakta dan hubungannya dengan sifat fenomena yang diteliti (Moleong, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.3. Peran Diplomasi dalam pencapaian Indonesia Emas 2045

Diplomasi memainkan peran kunci dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045. Menurut Kementerian Luar Negeri, untuk menjadi kekuatan besar di dunia, Indonesia harus mempunyai visi untuk memiliki peran lebih di lingkup global pada tahun 2045. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga

menekankan bahwa generasi muda, khususnya yang saat ini tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi, akan menjadi pilar dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Selain itu, Indonesia 2045.go.id menyebutkan bahwa penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai visi tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa diplomasi memegang peran penting dalam pencapaian Indonesia Emas 2045, baik melalui kontribusi generasi muda maupun melalui upaya penguatan diplomasi internasional. Berikut adalah beberapa cara diplomasi dapat mendukung perdagangan dan investasi:

- a) Pengembangan sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi (TTI): Diplomasi ekonomi Indonesia bertujuan untuk mengembangkan sektor TTI, yang meliputi perdagangan, pariwisata, dan investasi, serta meningkatkan akses pasar, ketahanan ekonomi, dan infrastruktur diplomasi.
- b) Peningkatan akses pasar: Diplomasi ekonomi Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain untuk menciptakan kesepakatan tarif dan non-tarif yang mendukung akses pasar untuk produk Indonesia.
- c) Pemanfaatan kekuatan geografis: Indonesia memiliki keuntungan letak geografis yang strategis dalam perdagangan internasional, yang menjadi faktor pendukung lainnya dalam meningkatkan posisi negara di pasar global.
- d) Pengembangan kawasan ekonomi: Indonesia mencoba bersinergi dengan kemajuan ekonomi global melalui pengembangan kawasan ekonomi, yang melibatkan kolaborasi dan kerjasama dengan negara-negara lain.
- e) Pengaruh budaya: Diplomasi ekonomi Indonesia juga melibatkan pengaruh budaya, yang dapat membantu meningkatkan brand image negara di pasar internasional.
- f) Kepentingan sumber daya manusia: Diplomasi ekonomi Indonesia menjadi alat untuk meningkatkan kepentingan sumber daya manusia (SDM) di negara ini, yang diharapkan menjadi kekuatan pertama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
- g) Pengembangan infrastruktur diplomasi: Diplomasi ekonomi Indonesia bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur diplomasi, seperti

infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses pasar.

- h) Dalam upaya mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, diplomasi ekonomi menjadi alat penting untuk mendorong perdagangan dan investasi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan negara dan kemajuan global.

1.4. Analisis Potensi Pasar dan Peluang Investasi

Indonesia, sebagai negara yang berpotensi ekonomi besar di Asia Tenggara, masih memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pasar-pasar potensial. Berikut adalah tinjauan terhadap beberapa pasar yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia:

- a) Pasar Digital: Penggunaan teknologi digital di Indonesia meningkat pesat, dan pasar digital masih berpotensi untuk pertumbuhan. Selain e-commerce, pasar digital lainnya seperti edukasi online, konsultasi medis online, dan layanan fintech juga menunjukkan pertumbuhan pesat. Di tahun 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 274 juta orang, atau sekitar 67% dari populasi total. (Source: "Indonesia Digital Economy Report 2021" oleh WBG dan Kominfo)
- b) Pasar Bersama (Co-working): Penggunaan co-working spaces di Indonesia meningkat pesat dengan jumlah pengguna co-working spaces di Jakarta mencapai lebih dari 35.000 orang di tahun 2021, dan pasar ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi karena memungkinkan lebih banyak orang untuk bekerja secara independen dan membantu mengurangi biaya operasional untuk perusahaan. (Source: "Co-working Spaces in Indonesia: Market Size, Growth, and Opportunities" oleh Colliers International Indonesia)
- c) Pasar Kesehatan: Indonesia memiliki populasi yang cukup besar dan berpotensi untuk pertumbuhan pasar kesehatan. Dengan peningkatan pendidikan dan penghasilan rakyat, pasokan kesehatan di Indonesia masih meningkat pesat dengan jumlah dokter yang baru saja lulus di sekolah medis setiap tahun mencapai lebih dari 15.000 orang. (Source: "Healthcare in Indonesia: Market Overview and Key Trends" oleh Frost & Sullivan).

- d) Pasar Infrastruktur: Pemerintah Indonesia telah memulai investasi dalam infrastruktur, seperti jalan tol, mass rapid transit (MRT), dan bandara internasional. Pasar infrastruktur masih berpotensi untuk pertumbuhan karena memungkinkan lebih mudah dan cepat untuk melakukan perdagangan dan transportasi di Indonesia. (Source: "Infrastructure Outlook in Indonesia" oleh PwC Indonesia)
- e) Pasar Agroindustri: Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi pertanian terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia telah memulai program agroindustri untuk mengolah produk pertanian menjadi produk olahan yang lebih bernilai tambah. Pasar agroindustri masih berpotensi untuk pertumbuhan karena memungkinkan lebih mudah dan cepat untuk melakukan perdagangan produk olahan di Indonesia. Di tahun 2021, nilai ekspor produk olahan hasil pertanian di Indonesia mencapai US\$ 33 miliar. (Source: "Indonesia Agribusiness Outlook 2021" oleh RaboResearch)
- f) Pasar Inovasi: Indonesia memiliki potensi dalam bidang inovasi, seperti teknologi green energy, teknologi agrotek, dan teknologi medis. Pemerintah Indonesia telah memulai program inovasi untuk mendukung start-up dan perusahaan yang bergerak dalam bidang inovasi. Pasar inovasi masih berpotensi untuk pertumbuhan karena memungkinkan lebih mudah dan cepat untuk melakukan perdagangan produk inovasi di Indonesia. (Source: "Innovation in Indonesia: A Roadmap for the Future" oleh McKinsey & Company)
- g) Pasar Edukasi: Indonesia memiliki populasi yang cukup besar dan berpotensi untuk pertumbuhan pasar edukasi karena ada permintaan tinggi dari masyarakat untuk pendidikan yang lebih baik dan lebih mudah diperoleh. Pemerintah Indonesia telah memulai program edukasi untuk mendukung pendidikan di seluruh Indonesia, seperti Program Kartu Pelajaran (PKP) dan Program Sarjana Madya (PSM). Pasar edukasi masih berpotensi untuk pertumbuhan karena memungkinkan lebih mudah dan cepat untuk melakukan perdagangan jasa edukasi di Indonesia. (Source: "Education in Indonesia: A Roadmap for the Future" oleh McKinsey & Company)

1.5. Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional bertujuan untuk mengevaluasi kemitraan perdagangan dan investasi dengan negara-negara utama dalam mencapai Visi Emas Indonesia 2045. Kolaborasi ini juga mencakup pengembangan strategi untuk memperkuat dan memperluas kerja sama internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah berikut dapat dilakukan:

- a) Melakukan analisis komprehensif terhadap perjanjian perdagangan dan investasi yang ada dengan negara-negara utama, seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Analisis ini harus mencakup penilaian terhadap manfaat dan tantangan kemitraan ini, serta bidang-bidang yang perlu ditingkatkan.
- b) Mengidentifikasi sektor-sektor prioritas untuk pengembangan lebih lanjut melalui kerja sama internasional, berdasarkan prioritas perekonomian Indonesia dan kebutuhan negara-negara mitra. Sektor-sektor ini mungkin mencakup infrastruktur, ekonomi digital, pertanian, dan energi terbarukan.
- c) Mengembangkan strategi untuk mendorong investasi dan perdagangan di sektor-sektor prioritas tersebut, seperti memberikan insentif bagi investor asing, memfasilitasi akses pasar, dan meningkatkan kerangka peraturan. Strategi-strategi ini juga harus mengatasi segala hambatan perdagangan dan investasi yang mungkin ada.
- d) Menumbuhkan kolaborasi di berbagai bidang seperti penelitian dan pengembangan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas. Hal ini dapat membantu mendorong inovasi dan daya saing di industri-industri utama, sekaligus mengatasi kesenjangan keterampilan yang mungkin ada.
- e) Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk kerja sama internasional, termasuk memperkuat peran lembaga-lembaga pemerintah terkait dan meningkatkan koordinasi di antara mereka. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa upaya kerja sama internasional dilaksanakan dan dipantau secara efektif.
- f) Memupuk hubungan antar masyarakat melalui inisiatif seperti pertukaran budaya, program pendidikan, dan kegiatan keterlibatan pemuda. Hal ini

dapat membantu meningkatkan saling pengertian dan kepercayaan antara Indonesia dan mitra-mitranya, sekaligus mengatasi hambatan budaya yang mungkin ada.

- g) Secara berkala memantau dan mengevaluasi efektivitas upaya kerja sama internasional, dengan menggunakan metrik seperti arus perdagangan, tingkat investasi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif.

1.6. Inovasi dalam Diplomasi Ekonomi

Berikut analisis inovasi diplomasi ekonomi yang dapat memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Ini juga mencakup contoh strategi diplomasi ekonomi yang berhasil diterapkan oleh negara lain:

- a) **Diplomasi Digital:** Penggunaan platform digital untuk mendorong diplomasi ekonomi telah mendapatkan momentum yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mencakup penggunaan media sosial, forum online, dan acara virtual untuk terhubung dengan bisnis dan investor asing. Misalnya, Program Jaringan Global (GNP) Singapura menggunakan platform digital untuk memfasilitasi pencocokan bisnis antara perusahaan Singapura dan asing. Program ini telah menghasilkan kesepakatan senilai lebih dari SGD 1 miliar sejak diluncurkan pada tahun 2013.
- b) **Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA):** FTA adalah alat utama untuk mendorong diplomasi ekonomi karena memberikan akses istimewa ke pasar luar negeri bagi bisnis dalam negeri. Indonesia telah menandatangani FTA dengan beberapa negara, antara lain Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Namun, terdapat ruang untuk perluasan lebih lanjut dari FTA, khususnya dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.
- c) **Promosi Investasi:** Promosi investasi melibatkan upaya aktif mencari peluang investasi asing dan memberikan insentif untuk menarik investor asing. Hal ini dapat mencakup keringanan pajak, proses regulasi yang disederhanakan, dan pembangunan infrastruktur. Misalnya, Otoritas Pengembangan Investasi Malaysia (MIDA) menyediakan serangkaian

layanan promosi investasi kepada investor asing, termasuk bantuan pemilihan lokasi, fasilitasi proyek, dan layanan purna jual.

- d) **Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS):** KPS melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk melaksanakan proyek infrastruktur atau inisiatif lain yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini dapat membantu memanfaatkan keahlian dan sumber daya sektor swasta untuk melaksanakan proyek dengan lebih efisien dan efektif. Misalnya, program KPS di Indonesia telah menghasilkan beberapa proyek yang sukses, termasuk sistem MRT Jakarta (Mass Rapid Transit) dan proyek pengembangan Pelabuhan Patimban.
- e) **Diplomasi Budaya:** Diplomasi budaya melibatkan peningkatan pertukaran dan pemahaman budaya sebagai sarana untuk membina hubungan ekonomi antar negara. Hal ini dapat mencakup inisiatif seperti festival budaya, program pertukaran bahasa, dan program pertukaran pendidikan. Misalnya, Pusat Kebudayaan Korea (KCC) Korea Selatan telah mendirikan cabang di beberapa negara untuk mempromosikan budaya dan bahasa Korea, yang telah membantu membina hubungan ekonomi antara Korea Selatan dan negara-negara tersebut.

1.7. Peran Sektor Swasta dan Publik

Sektor Swasta dan Publik memiliki peran yang sangat penting, Berikut adalah analisis bagaimana sektor-sektor tersebut dapat bekerja sama:

- a) **Kemitraan Pemerintah-Swasta:** Seperti disebutkan sebelumnya, KPS melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk melaksanakan proyek infrastruktur atau inisiatif lain yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini dapat membantu memanfaatkan keahlian dan sumber daya sektor swasta untuk melaksanakan proyek dengan lebih efisien dan efektif. Misalnya saja di Indonesia, pemerintah bermitra dengan perusahaan swasta untuk mengembangkan proyek infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan.
- b) **Kerangka Peraturan:** Sektor swasta dapat memberikan masukan terhadap kerangka peraturan untuk memastikan kerangka peraturan tersebut kondusif bagi investasi dan perdagangan. Hal ini dapat melibatkan kerja sama dengan

pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, seperti menyederhanakan proses peraturan dan insentif pajak bagi investor asing. Misalnya, di Singapura, pemerintah telah bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan kerangka peraturan yang mendukung inovasi dan kewirausahaan.

- c) **Peningkatan Kapasitas:** Sektor swasta dapat memberikan pelatihan dan program peningkatan kapasitas untuk membantu mengembangkan keterampilan pengusaha dan pekerja lokal, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional. Hal ini dapat melibatkan kerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan program pelatihan yang memenuhi kebutuhan bisnis lokal, seperti program promosi ekspor dan program pengembangan keterampilan bagi pekerja di industri-industri utama. Misalnya, di Indonesia, pemerintah telah bermitra dengan perusahaan swasta untuk memberikan program pelatihan bagi bisnis lokal di berbagai bidang seperti pemasaran ekspor dan pengembangan produk.
- d) **Akses Pasar:** Sektor swasta dapat membantu memfasilitasi akses pasar bagi dunia usaha dalam negeri dengan menyediakan informasi mengenai pasar luar negeri dan menghubungkan mereka dengan mitra potensial. Hal ini dapat melibatkan kerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan strategi akses pasar yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, seperti misi perdagangan dan program pencocokan bisnis. Misalnya, di Malaysia, pemerintah bermitra dengan perusahaan swasta untuk menyediakan layanan akses pasar bagi bisnis lokal, seperti layanan riset pasar dan layanan pengembangan bisnis.
- e) **Penelitian dan Pengembangan:** Sektor swasta dapat berkontribusi pada inisiatif penelitian dan pengembangan yang mendukung tujuan diplomasi ekonomi, seperti pengembangan teknologi atau produk baru yang memiliki potensi pasar global. Hal ini dapat melibatkan kerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan program penelitian dan pengembangan yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, seperti inisiatif penelitian bersama dan program transfer teknologi. Misalnya, di Korea Selatan, pemerintah telah bermitra dengan perusahaan swasta untuk

mengembangkan program penelitian dan pengembangan di berbagai bidang seperti bioteknologi dan energi terbarukan.

1.8. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi

Dalam mengembangkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan implementasi strategi diplomasi, beberapa sumber menyediakan contoh indikator kinerja yang relevan. Misalnya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyebutkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam diplomasi kebahasaan. Selain itu, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik juga menyajikan contoh indikator kinerja utama terkait dengan promosi aset-aset diplomasi Indonesia di berbagai bidang. Indikator kinerja tersebut dapat mencakup jumlah promosi yang dilakukan, jumlah program/kegiatan kerja sama, dan nilai survei keterbukaan informasi. Sementara itu, untuk sistem evaluasi yang efektif, belum ditemukan sumber yang secara khusus membahas sistem evaluasi untuk menilai dampak strategi diplomasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi. Namun, dalam konteks umum, evaluasi dapat mencakup analisis pertumbuhan perdagangan dan investasi dengan negara-negara kunci, dampak perjanjian perdagangan, serta peningkatan akses pasar dan pangsa pasar Indonesia di negara-negara tersebut. Selain itu, evaluasi juga dapat memperhitungkan kontribusi diplomasi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, diversifikasi pasar ekspor, dan peningkatan investasi asing langsung. Dengan gambaran yang komprehensif tentang dampak strategi diplomasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi Indonesia.

1.9. Sustainability dan CSR dalam Diplomasi Ekonomi

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pengakuan bahwa strategi diplomasi ekonomi harus memasukkan pertimbangan keberlanjutan dan CSR. Hal ini karena konsep-konsep ini semakin dipandang penting untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi jangka panjang, serta mengatasi tantangan sosial dan lingkungan. Berikut cara keberlanjutan dan CSR dapat diintegrasikan ke dalam strategi diplomasi ekonomi:

- a) Memasukkan Keberlanjutan dan CSR ke dalam Perjanjian Perdagangan: Perjanjian perdagangan harus mencakup ketentuan yang mendorong keberlanjutan dan CSR. Hal ini dapat melibatkan kerja sama dengan mitra dagang untuk mengembangkan praktik perdagangan berkelanjutan, seperti

mengurangi emisi gas rumah kaca, mendorong praktik ketenagakerjaan yang adil, dan melindungi hak asasi manusia.

- b) Mendorong Investasi pada Industri Berkelanjutan: Strategi diplomasi ekonomi harus mendorong investasi asing pada industri berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan kehutanan berkelanjutan. Hal ini dapat mencakup pemberian insentif pajak bagi investor asing di industri-industri tersebut, serta pengembangan kerangka peraturan yang mendukung praktik berkelanjutan.
- c) Mempromosikan Inisiatif CSR: Strategi diplomasi ekonomi harus mempromosikan inisiatif CSR yang mengatasi tantangan sosial dan lingkungan. Hal ini dapat melibatkan kerja sama dengan perusahaan swasta untuk mengembangkan program CSR yang memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, seperti program kesehatan atau program pendidikan.
- d) Membina Kemitraan antara Pemerintah dan Perusahaan Sektor Swasta: Strategi diplomasi ekonomi harus mendorong kemitraan antara pemerintah dan perusahaan sektor swasta untuk mendorong keberlanjutan dan CSR. Hal ini dapat melibatkan kerja sama dengan perusahaan sektor swasta untuk mengembangkan inisiatif bersama guna mengatasi tantangan sosial dan lingkungan, seperti kemitraan antara pemerintah dan perusahaan sektor swasta untuk mengembangkan proyek infrastruktur berkelanjutan.
- e) Mengembangkan Program Peningkatan Kapasitas: Strategi diplomasi ekonomi harus mengembangkan program peningkatan kapasitas yang mendorong keberlanjutan dan CSR. Hal ini dapat melibatkan kerja sama dengan dunia usaha dan komunitas lokal untuk mengembangkan keterampilan di bidang-bidang seperti pertanian berkelanjutan atau energi terbarukan, serta mengembangkan kerangka peraturan yang mendukung inisiatif peningkatan kapasitas.
- f) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Strategi diplomasi ekonomi harus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam inisiatif keberlanjutan dan CSR. Hal ini dapat mencakup pengembangan kerangka pelaporan yang mengharuskan perusahaan sektor swasta untuk melaporkan

inisiatif keberlanjutan dan CSR mereka, serta mengembangkan mekanisme untuk memantau kepatuhan terhadap persyaratan keberlanjutan dan CSR.

1.10. Strategi Diplomasi Perdagangan dan Investasi

Pemerintah Indonesia memiliki berbagai strategi diplomasi dan investasi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Beberapa strategi yang dapat dilakukan termasuk:

- a) Melakukan Penguatan Hubungan Bilateral dan Multilateral: dengan cara meningkatkan kerjasama ekonomi dengan mitra dagang utama dan berupaya menjalin kemitraan yang lebih kuat melalui perjanjian perdagangan dan investasi bilateral serta berpartisipasi aktif dalam forum dan organisasi multilateral.
- b) Pembukaan Akses Pasar Baru: membangun strategi untuk membuka akses pasar baru dan mencari peluang ekspor baru. Hal ini bisa melibatkan perundingan perjanjian perdagangan preferensial atau ekspansi ke pasar yang belum tergarap sepenuhnya.
- c) Menyediakan Fasilitas Perdagangan dan Investasi: meningkatkan keefektifan proses bea cukai, menyederhanakan regulasi perdagangan, dan memberikan insentif bagi investor untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi.
- d) Melakukan Promosi Investasi dan Pameran Dagang: menggelar promosi investasi dan pameran dagang baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menarik investor dan mempromosikan produk Indonesia ke pasar internasional.
- e) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan efisiensi logistik, termasuk pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi darat. Infrastruktur yang baik menjadi kunci untuk menarik investasi dan memfasilitasi perdagangan.
- f) Pengelolaan Risiko dan Kestabilan Hukum: memastikan iklim investasi yang stabil dan menarik dengan memberikan kepastian hukum, mengelola risiko politik dan ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi jangka panjang.
- g) Penguatan Sektor Unggulan: menetapkan dan mendorong pertumbuhan dalam sektor-sektor ekonomi yang menjadi keunggulan komparatif

Indonesia. Investasi dan perdagangan dapat diarahkan untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor tersebut.

- h) Pendidikan dan Pengembangan SDM: dimana melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi yang berkembang.
- i) Pengembangan Inovasi dan Teknologi: mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di sektor-sektor kunci agar Indonesia dapat bersaing secara global dan menarik investasi pada sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi.
- j) Pemberdayaan UKM: memfasilitasi peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam rantai pasok global, mendukung akses mereka ke pasar internasional, dan memberikan dukungan finansial dan teknis.
- k) Pemberdayaan Masyarakat Lokal: memasukkan aspek pemberdayaan masyarakat lokal dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam strategi diplomasi perdagangan dan investasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.
- l) Keberlanjutan dan Lingkungan: mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam kebijakan dan praktik perdagangan dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82) Kondisi kerja yang baik adalah ketika manusia dapat melaksanakan pekerjaan secara optimal sehat, aman dan nyaman (Pandu Widodo, Hesti et al 2024:73)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Penyusunan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pemerintah. Hal tersebut dikarenakan dalam konteks meningkatkan akuntabilitas, Partisipasi dalam penyusunan anggaran mem-buka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan alokasi dan penggunaan sum-ber daya publik. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses ini, aparat pemerintah akan merasa lebih bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program yang telah di-rencanakan.
2. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kinerja Aparat Pemerintah. Hal tersebut dikarenakan Ke-jelasan sasaran anggaran dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya sasaran yang jelas, akan lebih mudah untuk mengevaluasi kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran.
3. Evaluasi Anggaran berpengaruh negatif dan Signifikan terhadap Kinerja Aparat Pemerintah. Hal tersebut dikarenakan hasil evaluasi menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan dengan tepat dan berhasil mencapai target, maka dapat dikatakan bahwa kinerja aparat pemerintah tersebut baik. Sebaliknya, apabila evaluasi menunjukkan bahwa anggaran tidak digunakan secara efektif atau target belum tercapai, maka hal ini menunjukkan adanya kelemahan atau kegaga-lan dalam kinerja aparat pemerintah.
4. Partisipasi Penyusunan Anggaran yang dimoderasi oleh budaya kerja berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Kinerja Aparat Pemerintah. Hal tersebut dikarenakan Dalam konteks, kompleksitas dan kerumitan proses, Semakin banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran, semakin kompleks dan rumit prosesnya. Hal ini dapat menghambat efisiensi dan efektivitas aparat pemerintah da-lam mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Budaya kerja yang mendukung partisipasi yang tinggi cenderung memiliki proses yang lebih panjang dan rumit, sehingga dapat mengganggu kinerja aparat pemerintah.
5. Kejelasan Sasaran Anggaran yang dimoderasi oleh budaya kerja berpengaruh Negatif dan Signifikan terhadap Kinerja Aparat Pemerintah. Hal tersebut dikarenakan jika sasaran anggaran tidak cukup jelas atau memiliki indikator kinerja yang ambigu, maka aparat pemerintah akan kesulitan dalam merumuskan tindakan

konkret yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut. Ketika sasaran-sasaran anggaran tidak dapat diukur secara objektif atau tidak dipahami dengan jelas, aparat pemerintah mungkin menjadi tidak fokus atau terlalu terfragmentasi dalam upaya mereka. Sebaliknya, jika kejelasan sasaran anggaran yang dimoderasi oleh budaya kerja tinggi, maka ini akan mendorong aparat pemerintah untuk lebih fokus, terorganisir, dan komitmen dalam mencapai sasaran tersebut. Budaya kerja yang mendukung kerjasama tim, inovasi, dan akuntabilitas akan secara positif mempengaruhi kinerja aparat pemerintah. Namun sayangnya, penerapan budaya kerja ini masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi sehingga berdampak pada kinerja aparat pemerintah.

6. Evaluasi Anggaran yang dimoderasi oleh budaya kerja tidak berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pemerintah. Hal tersebut dikarenakan Budaya kerja yang terlalu fokus pada pengawasan anggaran dan mempertahankan ketatnya pengeluaran dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja aparat pemerintah. Selain itu, budaya kerja yang terlalu fokus pada evaluasi anggaran juga dapat menciptakan praktik budget slack, yaitu mengalokasikan anggaran yang lebih rendah dari yang sebenarnya dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan anggaran yang lebih mudah. Hal ini dapat memberikan dampak negatif pada kinerja aparat pemerintah karena sumber daya yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugasnya tidak tersedia.
7. Budaya Kerja berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kinerja Aparat Pemerintah. Hal tersebut dikarenakan Budaya kerja yang tinggi mencerminkan sikap, nilai, dan norma yang ditanamkan dalam diri aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Budaya kerja yang tinggi seringkali terkait dengan semangat kerja yang kuat, etos kerja yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi, disiplin, kejujuran, pengabdian, dan sebagainya. Semua itu secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kinerja aparat pemerintah.
8. Perluasan Informasi Publik: Meningkatkan sosialisasi dan edukasi publik mengenai visi "Indonesia Emas 2045" serta dampaknya terhadap ekonomi dan pembangunan nasional. Peningkatan pemahaman masyarakat dapat menjadi basis dukungan yang lebih kuat.

9. Penetapan Prioritas Pasar dan Investasi: Mengidentifikasi dan menetapkan prioritas pasar dan sektor investasi yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Fokus pada sektor-sektor ini dapat meningkatkan efisiensi sumber daya.
10. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan strategi diplomasi ekonomi dan memastikan akuntabilitas terhadap masyarakat. Laporan berkala dan keterlibatan publik dapat meningkatkan legitimasi strategi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Sholeh, Abdul et. Al. 2024. Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya, *Journal Of Management and Creative Business* Vol. 2 No. 1 Januari 2024, Halaman : 82 - 96
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2019). *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2019-2024: Mewujudkan Visi Emas Indonesia 2045*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bank Pembangunan Asia (2018). *Pembangunan Sektor Swasta: Sebuah Kerangka Aksi*. Manila: Bank Pembangunan Asia (ADB).
- Cooper, A. F., & Momani, B. (2014). *The Diplomacy of Small States: Between Vulnerability and Resilience*. *Global Society*, 28(4), 489–505.
- Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD) (2018). *Kasus Bisnis untuk SDGs: Kerangka Kerja Keterlibatan Perusahaan*. Jenewa: Penerbitan WBCSD.
- Forum Ekonomi Dunia (2019). *Kolaborasi Pemerintah-Swasta: Bagaimana Dunia Usaha Dapat Bekerja Sama dengan Pemerintah untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*. Jenewa: Forum Ekonomi Dunia.
- <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/eeee47a-5bda-4447-bddb-951fba7150f2>
- <https://intermestic.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/download/223/63>
- [https://kemlu.go.id/portal/id/read/5416/berita/indonesia-perlu-beradaptasi-dengan-disrupsi-dan-tantangan-untuk-mencapai-visi-indonesia-emas-2045\(1\)](https://kemlu.go.id/portal/id/read/5416/berita/indonesia-perlu-beradaptasi-dengan-disrupsi-dan-tantangan-untuk-mencapai-visi-indonesia-emas-2045(1))
- <https://www.kemenkopmk.go.id/indonesia-emas-2045-diwujudkan-oleh-generasi-muda> ,
<https://indonesia2045.go.id/>
- [https://www.kompasiana.com/fritz20/655c5e78110fce609d274a12/menyongsong-era-indonesia-emas-2045\(5\)](https://www.kompasiana.com/fritz20/655c5e78110fce609d274a12/menyongsong-era-indonesia-emas-2045(5))

[https://www.liputan6.com/global/read/5450139/wamenlu-ri-demi-capai-visi-indonesia-emas-2045-perekonomian-indonesia-perlu-sinergi-dengan-kemajuan-ekonomi-global\(4\)](https://www.liputan6.com/global/read/5450139/wamenlu-ri-demi-capai-visi-indonesia-emas-2045-perekonomian-indonesia-perlu-sinergi-dengan-kemajuan-ekonomi-global(4))

<https://www.mida.gov.my/what-we-do/investment-promotion-services/>

https://www.researchgate.net/publication/373141568_Strategi_Diplomasi_Ekonomi_Indonesia_Dalam_Memajukan_Pembangunan_Ekonomi_Nasional_Melalui_Kepemimpinan_Indonesia_Dalam_Forum_G-20_TAHUN_2022

Kementerian Luar Negeri (2021). *Agenda Kebijakan Luar Negeri Indonesia 2021-2024: Mempromosikan Tata Dunia yang Adil dan Inklusif bagi Seluruh Umat Manusia*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri.

Kementerian Perdagangan (2021). *Agenda Kebijakan Perdagangan Indonesia 2021-2024: Memperkuat Ketahanan melalui Kerjasama Ekonomi Internasional*. Jakarta: Kementerian Perdagangan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Republik Indonesia. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 2020

Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (2017). *Kemitraan Pemerintah-Swasta untuk Pembangunan Infrastruktur: Panduan bagi Pembuat Kebijakan*. New York: Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD).

Organisasi Perdagangan Dunia (2019). *Tinjauan Kebijakan Perdagangan: Republik Korea*. Jenewa: Organisasi Perdagangan Dunia.

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) (2019). *Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab: Panduan Praktis untuk Bisnis yang Beroperasi di Luar Negeri*. Paris: Penerbitan OECD.

Pandu Widodo, Hesti et. al. 2024. Dampak Pelatihan, Motivasi dan Lingkungan Kerja pada Kinerja Karyawan PT. KAI (Persero) di Stasiun Surabaya Pasar Turi, *Journal Of Management and Creative Business* 2 (1) , 66 - 8

Perjanjian Global PBB (2019). *Kasus Bisnis untuk SDGs: Panduan Praktis untuk Perusahaan*. New York: Kantor Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pfefferbaum, B., North, C. S., & Pfefferbaum, R. L. (2014). Mental Health and the Built Environment: More than Bricks and Mortar? In Y. A. Edgerton (Ed.), *The Handbook of Interior Architecture and Design* (pp. 491–505). Wiley.

Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to Investment in Education: A Decennial Review of the Global Literature. *Education Economics*, 26(5),445-458.

World Bank. (2020). *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. World Bank Group.